

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, I., dan Mochamad, N. (2012). *Perpajakan untuk Bendaharawan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Buana, A. (2009). *Analisis Pengaruh Risk Assessment terhadap Rating Audit (Studi pada Bank "X")*. Tesis Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawi, H. (2002). *Manajemen Risiko*. Edisi Kesatu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Hidayat, N. (2013). *Corporate Tax Risk Management*. Inspiring Dialogue, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tanggal 8 Februari 2013.
- Indonesian Tax Review*. (2012). Timbul Tenggelam Wapu BUMN. Edisi 17 Volume V, hal. 6-11.
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara untuk Memungut dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dibayar oleh Pemerintah untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu dan Bendaharawan untuk Memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Olsson, C. (2002). *Risk Management in Emerging Markets. How to Survive and Prosper?* Prentice Hall – Financial Times. Perason Education Asia, Great Britain.
- Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, seta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pusat Penyuluhan Perpajakan Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak. (1996). *Buku Panduan bagi BUMN/BUMD sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara*.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Setyobudi, Y. (2006). *Pemodelan Penilaian Risiko (Risk Assessment) dalam Perencanaan Aduit Umum pada Divisi Audit Intern (Studi Kasus pada PT Bank ABC Kantor Cabang Jakarta)*. Tesis Magister Sains Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Sukardji, U. (2012). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Revisi 2012, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suprajadi, L., Elvy M., dan Sylvia K. (2011). Penilaian Risiko Pengenaan Sanksi Administratif Perpajakan atas Pelaporan Pajak (Studi Kasus pada PT “X” Bandung). *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, hal 107-121.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id). (2013). Realisasi Pendapatan Negara 2012 Capai Rp 1.335,7 Triliun diakses pada tanggal 21 Mei 2013.
- [www.jurnalakuntansikeuangan.com](http://www.jurnalakuntansikeuangan.com). (2011). Bagaimana Caranya Mengelola Manajemen Risiko? diakses pada tanggal 28 Februari 2013.
- [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id). (2012). Indonesia Keberatan BUMN sebagai Wapu diakses pada tanggal 28 Februari 2013.